



Siaran Pers
Pengadilan Distrik Dili
19 November 2014

Kunjungan Perdana Menteri ke Pengadilan Distrik Dili berpotensi memunculkan beragam pertanyaan

Pada tanggal 18 November 2014, Perdana Menteri (PM), Xanana Gusmão melakukan kunjungan ke Pengadilan Distrik Dili.

Dalam kunjungan tersebut, Perdana Menteri bertemu langsung dengan Ketua Pengadilan Distrik Dili, Duarte Tilman dan pertemuan tersebut digelar secara tertutup.

JSMP mengamati bahwa sebelum kunjungannya, di sekitar Pengadilan Distrik Dili dipenuhi oleh tim pengamanan dari kepolisian dan para keamanan sipil. Lembaga-lembaga lain yang turut hadir antara lain beberapa anggota Parlemen, anggota pemerintah, LSM, media nasional dan internasional dan masyarakat umum lainnya.

Setelah kunjungannya, Duarte Tilman, menerangkan bahwa kehadiran PM di pengadilan bertujuan untuk menyerahkan dokumen ke Pengadilan Distrik Dili sehubungan dengan kasus tertentu yang masih dalam proses penyelidikan. Selain itu, pihaknya menerangkan bahwa kunjungan ini juga memberikan dorongan terhadap pengadilan untuk tetap berkerja dengan independen. Dalam pertemuan tersebut PM menerangkan bahwa Pemerintah menghargai putusan pengadilan dan prinsip pemisahan kekuasaan dalam Konstitusi RDTL.

“JSMP berpandangan bahwa kehadiran kepala pemerintah di pengadilan dapat memunculkan beragam interpretasi dan pertanyaan mengenai perihal independensi peradilan dan pemisahan kekuasaan sebagaimana diatur dalam Konstitusi RDTL”, kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

Sebelumnya, pada tanggal 24 dan 30 Oktober 2014, Parlemen Nasional (PN) dan Pemerintah mengeluarkan tiga resolusi secara berturut-turut untuk melakukan audit terhadap sektor peradilan dan memutuskan hubungan kerja para aktor peradilan internasional. Resolusi-resolusi ini masih dalam perdebatan dan masih banyak orang yang mempersoalkan keabsahan dan konstitusionalitasnya, termasuk sikap penolakan tegas dari pengadilan sendiri bahwa resolusi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan.

Selain itu, tampilnya PM di program debate atau wawancara di televise yang mengkritik keras putusan pengadilan dan ketidakmampuan para hakim,

menjadikan kunjungan ini, dapat terus memunculkan beragam pertanyaan di masyarakat dan para partner strategik pemerintah yang selama ini mendukung program pengembangan sektor pengadilan di Timor-Leste.

JSMP mengamati bahwa resolusi Parlemen dan Pemerintah untuk menghentikan para aktor hukum internasional sangat berdampak pada produktivitas pengadilan, misalnya banyak kasus yang harus ditunda oleh pengadilan.

JSMP sangat menghargai pernyataan Perdana Menteri mengenai sikapnya untuk menghargai putusan pengadilan dan prinsip pemisahan kekuasaan. Oleh karena itu, JSMP mendorong Pemerintah dan PN untuk memungkinkan pengadilan menjalankan fungsi mereka secara bebas tanpa adanya tekanan dan intervensi terhadap fungsi sektor peradilan. Karena institusi-institusi judisial merupakan pilar penting dalam Negara demokrasi dan merupakan bagian integral dari kepentingan nasional Timor-Leste.

JSMP merasa prihatin karena kunjungan PM dengan mobilisasi dukungan yang sangat besar di pengadilan, secara psikologis akan berdampak terhadap kinerja pengadilan dan para penegak hukum lainnya, apalagi kehadiran ini tanpa melalui surat panggilan resmi dari pengadilan. JSMP mendorong semua otoritas Negara untuk berkontribusi terhadap penguatan peranan pengadilan sebagai salah satu institusi demokratis di Timor -Leste.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
E-mail: luis@jsmp.minihub.org
info@jsmp.minihub.org
Telefon: +670 3323883 | +670 77295795
Website: www.jsmp.tl
Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp
Twitter: @JSMPtl